

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SELOMARTO KECAMATAN GIRIWOYOKABUPATEN WONOGIRI

Nasyia Afria Larasati, Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Keterlambatan Desa Selomarto dalam mengirim rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa serta laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan desa di Desa Selomarto. Selain itu, untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto. Penelitian ini menggunakan teori *actuating* menurut Syafie dan Hasibuan dimana variabel yang diambil adalah komunikasi, pengawasan, dan kepemimpinan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas, fungsi, struktur, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Faktor penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ini adalah ketidaktepatan pengawasan, gaya kepemimpinan Kepala Desa Selomarto yang tidak efektif serta kualitas perangkat desa yang rendah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah komunikasi dalam organisasi. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya perubahan pusat perhatian dalam pengawasan, perubahan gaya kepemimpinan Kepala Desa Selomarto serta pembinaan dan pendampingan perangkat desa yang lebih intens.

Kata Kunci: *pengelolaan; Anggaran pendapatan dan belanja desa; desa; APBDes.*

*Management of Village Revenue and Expenditure Budget in Desa Selomarto
Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri*

Nasyia Afria Larasati, Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The lateness of Desa Selomarto in sending draft of village regulatio about village revenue adn expenditure budget and the report on the realization of the implementation of the villagerevenue and expenditure budget, are become the background of this study. The purpose of this study is to describe and analyze the management of village revenue and expenditure budget in Desa Selomarto. In addition, the purpose of this study are to describe, identify and analyze the supplementary and the inhibition factors in managing the village revenue and expenditure budget in Desa Selomarto. This study uses actuating teory according to Syafiie and Hasibuan where variables which taken are communication, supervision, and leadership with a qualitative approach. The technique which uses to collect the data are interview, obersevation, and documentation. The selection of informants usess purposive sampling technique. The result of the study shows that the the principles, functions, structure, implementation, administration, reporting, and accountability of village income and expenditure budgets have not been fully implemented. Futhermore, factors which inhibit the management of village revenue and expenditure budget in Desa Selomarto arethe inaccuracy of supervision, the ineffective leadership style of the Village Head of Selomarto and the low quality of village officials. While the supporting factor is communication within the organization. The recommendation which given by the researcher are the need for changers in the focus of attention in supervision, changes in the leadership style for the Village Head of Desa Selomarto and the more intensesense of assistance village official.

Keywords: *management; village revenue and expenditure budget; village; APBDes.*

A. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa sudah semestinya dapat dikelola dengan baik, karena desa juga mendapatkan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pendapatan desa. Jumlah dana juga tidak sedikit, berikut jumlah besaran dana desa yang telah digulirkan Pemerintah:

Tabel 1.1.

“Besaran Jumlah Dana Desa 2015-2017”

No	Tahun	Jumlah (Triliun)
1	2015	20, 76
2	2016	46, 9
3	2017	60

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya, besaran dana desa terus meningkat. Sepanjang tahun 2015-2017 peningkatan rata-rata dengan 20 triliun per-tahunnya. Dilansir dari situs kemenkeu.go.id, penggunaan dana desa rata – rata dialokasikan untuk jalan desa, drainase, PAUD, jembatan,

sarana olahraga, air bersih, posyandu, dan lain-lain dengan pendamping desa hingga saat ini sebanyak 36.384 orang. Dana desa merupakan salah satu dari pendapatan desa yang masuk melalui transfer, selain itu ada juga alokasi dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Besarnya pendapatan yang ada di desa menjadikan pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah di era otonomi ini, bahwa pemerintah desa di era otonomi ini menurut Adisasmita (2011:29) dituntut untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa kemudian tercermin melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Keuangan desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Herlianto (2017: 7-9) dalam peengelolaannya berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa Selomarto sebagai salah satu desa di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu desa yang terlambat dalam mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibanding desa-desa lain yang ada di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Hal ini salah satunya karena Perangkat Desa di Desa Selomarto tingkat pendidikannya masih rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip inventaris desa Kecamatan Giriwoyo, sebanyak 6 perangkat dari 14 perangkat yang ada merupakan lulusan SLTP, 6 lainnya lulusan SD dan 2 diantaranya lulusan SLTA.

Berdasarkan fenomena dan data yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan desa di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dan faktor apakah mempengaruhinya.

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2006:25) merupakan manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Kemudian John M. Pfiffner dan Rober V. Presthus (1960 dalam Kencana Syafii, 2006: 24) mengartikan administrasi publik sebagai usaha-usaha melalui teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok dan perorangan yang terkait dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.

Berdasarkan dua pendapat mengenai Administrasi Publik tersebut, terdapat dua fokus dalam administrasi publik yaitu manajemen dan kebijakan yang berorientasi pada publik.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik sebagai bagian dari administrasi publik menurut Keban (2004:85) memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Sedangkan menurut Islamy (2003:56) Manajemen Publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung.

Berdasarkan pendapat dari Keban dan Islamy yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa manajemen publik dalam administrasi publik memuat proses dan fungsi manajemen.

3. Manajemen

Manajemen diartikan George Terry (dalam Syafii, 2006:49) sebagai suatu proses khusus yang terdiri perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Sementara itu di dalam manajemen terdapat istilah pengelolaan yang menurut Prajudi (dalam Adisasmita, 2014:21) merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, yang secara etimologi berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau

menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam hal ini manajemen adalah sama dengan pengelolaan.

Selain itu menurut Hariani (2013: 16) dalam menggerakkan sekelompok manusia dengan metode ilmiah serta dibantu sumber/faktor tertentu, manajemen mempergunakan fungsi-fungsi tertentu.

4. Fungsi-fungsi Manajemen

George R. Terry (dalam Syafiie, 2006:48) menyatakan bahwa dalam manajemen terdiri atas kegiatan dan fungsi berikut ini:

1. Perencanaan/ *planning*, merupakan kegiatan penetapan tujuan yang meliputi keputusan tentang yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan;
2. Pengorganisasian/ *organizing*, merupakan pembagian pekerjaan diantara orang-orang yang usahanya dikoordinasikan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus melalui kegiatan berbagai orang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing;
3. Pelaksanaan/ *actuating* merupakan gerak pelaksana dari kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan, ; dan
4. Pengawasan/ *controlling* yang merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan

organisasi dan manajemen telah tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam manajemen terdapat kegiatan dan fungsi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

5. Pengelolaan

Pengelolaan yang menurut Prajudi (dalam Adisasmita, 2014:21) sama dengan manajemen, di dalamnya terdapat fungsi pelaksanaan/ *actuating* yang menurut George. R. Terry (dalam Syafiie, 2006: 48) merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi. Menurut Syafiie (2011:102), dalam *actuating* atau pelaksanaan dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:

1. *Motivating* atau memberikan pendorongan semangat kerja
2. *Facilitating* atau memberikan sarana dan prasarana agar sempat mampu bekerja
3. *Directing* yaitu memberikan pengarahan kepada bawahan untuk mampu bekerja atau agar dapat bekerja dengan tepat
4. *Communicating* atau komunikasi dalam organisasi yang ditandai dengan adanya penyampaian informasi terkait dengan kebijakan, peraturan, prosedur,

program, dan sasaran kerja; penugasan di pengarahannya; penyampaian umpan balik oleh tentang perilaku dan kinerjanya; penyampaian laporan keadaan (*status report*) dan laporan perkembangan (*program report*); penyampaian gagasan dan usulan untuk peningkatan kinerja dan pemecahan masalah; serta penyampaian ungkapan perasaan, sikap, dan keluhan yang berkaitan dengan kerja dan pribadi bawahan.

5. *Controlling* atau memberikan pengawasan.

Menurut Hasibuan (2006:184), faktor-faktor yang mempengaruhi *actuating* adalah sebagai berikut:

1. Tingkah Laku Manusia
2. Hubungan manusiawi
3. Komunikasi
4. Kepemimpinan

Salah satu model kepemimpinan yang dikemukakan oleh Fiedler (dalam Wahjosumidjo, 1987:96) menyatakan bahwa ada tiga macam hal penting yang akan menentukan gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu:

- a. Hubungan antara pemimpin dengan bawahan
- b. Struktur tugas
- c. Kewibawaan kedudukan pemimpin

6. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Herlianto (2017: 7-9) perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu sebagai transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (dalam Herlianto, 2017: 3) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

E. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap data terkait masalah yang telah dirumuskan, bahwa jawaban atas masalah yang telah dirumuskan baru akan terjawab ketika peneliti melihat, mengamati dan menganalisis dengan serius. Dimana lokus penelitian berada di Desa Selomarto, Kecamatan Girwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan orang atau informan yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial terkait Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, yaitu:1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Wonogiri; 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Giriwoyo; 3) Pendamping Desa Selomarto; 4) Pemerintah Desa Selomarto; 5) Badan Permusyawaratan Desa Selomarto; dan 6) Masyarakat Desa Selomarto.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primeryangdiperoleh dari jawaban langsung informan baik dari Pemerintah Desa Selomarto, Pemerintah Kecamatan Giriwoyo, Pendamping Desa Selomarto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri, Masyarakat Desa Selomarto, maupun Badan Permusyawaratan Desa Selomarto, serta data sekunderberupa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta data lain yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan intrepetasi dalam penelitian ini dilakukan *data reduction* dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Setelah ditemukan fokus terhadap hal yang penting kemudian dilakukan penyajian data dengan diagram, tabel maupun uraian terkait data tersebut, disajikan *display data* yang berbentuk tabel mengenai anggaran

pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto. Setelah *data reduction* dan *data display dirangkum dan disajikan*, dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan uraian data yang disajikan.

Kualitas dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan perpanjangan pengamatan data ke lapangan di Pemerintah Desa Selomarto untuk menguji data yang telah diperoleh terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Untuk melakukan validitas data dilakukan triangulasi, yaitu pengujian data dengan mengecek data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

F. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1.1 Asas-Asas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Bab ii pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi, disiplin dan tertib anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memahami asas pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya sebatas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan didalam penyusunan dilakukan

bersama-sama dengan BPD dan masyarakat. Asas akuntabel belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto terkendala kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung. Asas partisipatif belum dilaksanakan dengan baik, karena keterlibatan masyarakat secara langsung hanya sebatas pada kehadiran saat penggalan gagasan melalui musyawarah dusun, sedangkan pada tahap pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat cenderung apatis. Asas transparansi belum dapat berjalan dengan baik karena dalam tahap perencanaan, meskipun masyarakat telah diberikan akses untuk mengusulkan pendapatnya di musyawarah dusun, namun dalam hasil akhir penyusunannya, Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur perwakilan masyarakat hanya diberi sedikit akses untuk ikut serta menyatakan pendapatnya terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Asas tertib dan disiplin anggaran belum berjalan dengan baik karena masih sering terjadi keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Bab iii pasal 5 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran pendapatan dan belanja desa sudah dipahami Pemerintah Desa Selomarto sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, merencanakan kegiatan pemerintahan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara sebagai fungsi alokasi dan stabilisasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selomarto sendiri belum sepenuhnya dapat diterapkan, karena berdasarkan fakta di lapangan, anggaran pendapatan dan belanja desa belum berfungsi untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran serta meningkatkan perekonomian di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih difungsikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan belum ke pembangunan masyarakat desa. Padahal terdapat potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian desa.

1.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa dalam bab iii pasal 6 Peraturan Bupati Wonogiri nomor 20 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

1.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan desa di Desa Selomarto masih bergantung transfer dana desa dan alokasi dana desa. Karena pendapatan asli

desa di Desa Selomarto hanya berasal dari tanah bengkok yang disewakan 12 juta setiap tahunnya, pendapatan itupun digunakan untuk tambahan tunjangan perangkat desa. Selain itu Desa Selomarto juga belum memiliki Badan Usaha Milik Desa, meskipun ada potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa.

1.3.2 Belanja Desa

Belanja desa di Desa Selomarto selama 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 hingga 2018, 65 persen digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa terutama pembangunan rabat beton, cor blok, talud, dan sirtunisasi jalan distrik desa. Sedangkan 33 persen digunakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk penghasilan dan tunjangan perangkat. Sisanya tidak lebih dari 4 persen digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa Belanja Desa Selomarto diutamakan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, sedangkan belanja desa untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat sedikit.

1.3.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto terdiri atas penerimaan pembiayaan berupa SILPA atau sisa lebih pendapatan anggaran. SILPA di Desa Selomarto ada karena pada dalam pembuatan rancangan anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan selalu

dilebihkan, sehingga setiap tahun pasti ada sisa lebih anggaran pendapatan anggaran. Pada tahun 2017 SILPA di anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto berjumlah 25 juta 122 ribu 111 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sisa lebih pendapatan anggaran Desa Selomarto sebesar 91 juta 761 ribu 72 rupiah.

1.4 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Selomarto sendiri telah bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan yang sudah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun berdasarkan fakta di lapangan, pengawasan Masyarakat Desa Selomarto terhadap pelaksanaan kegiatan cenderung kurang, padahal penggunaan anggaran dalam kegiatan yang ada perlu dikawal oleh Masyarakat Desa Selomarto. Pelaksanaan kegiatan juga terhambat oleh kualitas Perangkat Desa Selomarto yang rendah dalam mengelola administrasi untuk pencairan dana desa dan alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten. Sehingga ada keterlambatan pencairan dana desa dan alokasi dana desa yang menjadi sumber pendapatan pokok Desa Selomarto, yang kemudian menghambat kegiatan penerimaan dan pengeluaran Desa Selomarto untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

1.5 Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penatausahaan di Desa Selomarto berdasarkan fakta di lapangan terkendala oleh Bendahara Desa Selomarto yang sudah tua dan tidak dapat mengoperasikan komputer, sehingga dalam melakukan pencatatan masih dilakukan secara manual dan perlu bantuan perangkat lain di luar tugas, pokok, dan fungsinya. Bendahara Desa Selomarto tidak bisa menjadi tumpuan kegiatan penatausahaan, karena masih memerlukan bantuan perangkat lain yang tidak sesuai tugas, pokok, dan fungsinya.

1.6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di

Kabupaten Wonorejo merupakan masalah yang paling menonjol dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, Desa Selomarto termasuk di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonorejo yang paling terlambat dalam menyelesaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran kepada Bupati, baik pada semester awal maupun di semester akhir. Selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Selomarto kepada Badan Permusyawaratan Desa juga belum dilaksanakan dengan baik, karena Badan Permusyawaratan Desa perlu mendesak Pemerintah Desa Selomarto untuk mendapat laporan realisasi pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Sedangkan, menurut Herlianto (2017: 15), Pemerintah Desa selain memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan kepada Bupati/ Walikota, Pemerintah Desa juga wajib menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.1 Faktor Pendukung

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto mendukung karena terdapat;

- a. Penyampaian informasi yang jelas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonorejo, Kecamatan Giriwoyo, dan Pendamping Desa;
- b. keleluasaan perangkat desa untuk menyampaikan
- c. gagasan, usulan, penyampaian ungkapan perasaan, sikap, dan keluhan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto mendukung karena meskipun struktur tugas yang diberikan tidak berpola, namun Kepala Desa

Selomarto memiliki hubungan yang sangat baik dengan perangkat desa serta memiliki kewibawaan yang sangat kuat di Desa Selomarto.

2.2 Faktor Penghambat

1. Pengawasan

Pengawasan menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa karena hal berikut ini:

- a. Ketidaktepatan pusat perhatian, karena berdasarkan fakta di lapangan Kepala Desa Selomarto memusatkan perhatiannya pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur daripada kegiatan lain yang dilaksanakan di kantor Desa Selomarto. Padahal yang rawan terjadi penyimpangan berdasarkan fakta di lapangan adalah pada kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- b. Rendahnya koordinasi dalam organisasi, karena berdasarkan fakta di lapangan koordinasi antar perangkat dan Kepala Desa Selomarto belum terlaksana dengan baik, karena dalam kegiatan penatausahaan, pelaksanaannya belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, pengawasan yang seharusnya dapat terkoordinasi dengan BPD selaku badan pengawas pemerintah yang mewakili masyarakat juga tidak

dapat berjalan dengan baik, karena akses yang diberikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa baik dalam tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa masih sangat sedikit.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

- a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selomarto belum berjalan dengan baik, hal itu ditandai dengan rendahnya pemahaman perangkat desa mengenai asas-asas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan belum dilaksanakannya asas transparansi, akuntabel, partisipatif, disiplin dan tertib anggaran di dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dipahami dan diterapkan sebagai perencanaan pembangunan infrastuktur desa. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto yang berupa pendapatan desa masih bergantung terhadap pendapatan desa, karena pendapatan asli desa masih minim dan desa tidak memiliki badan usaha milik desa. Belanja desa diprioritaskan untuk pembangunan fisik desa\ Pembiayaan desa terdapat

penerimaan pembiayaan yang berupa sisa lebih pendapatan anggaran yang bisa mencapai 90 juta per-tahunnya. Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkendala oleh kualitas perangkat desa yang rendah.

- b. Faktor pendukung pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ini adalah komunikasi dalam organisasi yang ditandai dengan penyampaian informasi mengenai arahan, prosedur dan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah jelas, serta adanya kesempatan perangkat desa untuk menyampaikan gagasan, usulan, keluhan, perasaan, dan sikap kepada perangkat desa lain, kepala desa, dan pendamping desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kepemimpinan juga menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa karena kewibawaan kepala desa sangat kuat dan hubungan kepala desa dan perangkat desa sangat baik. Sedangkan, faktor penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto adalah pengawasan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa,

dimana terdapat ketidaktepatan pusat perhatian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu pengawasan juga tidak terkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah Desa Selomarto, karena koordinasi antar perangkat desa, kepala dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat yang berfungsi untuk mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak berjalan dengan baik. Selain itu struktur tugas yang diberikan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berpola.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang belum dipahami dan diterapkan sepenuhnya di Desa Selomarto, hendaknya dapat dipahami dan diterapkan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa Selomarto dan Masyarakat Desa Selomarto.

- b. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto hendaknya diarahkan juga kepada fungsi alokasi untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian, serta fungsi stabilitas untuk memelihara keseimbangan perekonomian desa.
- c. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto yang berupa pendapatan desa hendaknya mulai diarahkan untuk tidak bergantung dengan transfer pemerintah pusat dengan melakukan pembentukan badan usaha milik desa yang dapat. Belanja desa yang lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur jalan, hendaknya dapat diarahkan juga kepada pemberdayaan manusia.
- d. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang belum berjalan dengan baik karena terkendala kualitas Perangkat Desa Selomarto yang rendah dalam mengelola administrasi desa, hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas perangkat desa
- e. Penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang terhambat bendahara desa yang sudah tua dan tidak dapat mengoperasikan komputer, hendaknya dapat diatasi dengan pergantian bendahara desa dengan perangkat desa yang lebih handal.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang tidak tepat waktu dan belum sesuai dengan peraturan, sebaiknya dapat diatasi dengan peningkatan asas disiplin dan tertib anggaran dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta asas transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa baik kepada masyarakat khususnya kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur perwakilan masyarakat.
- g. Pengawasan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebaiknya ditingkatkan melalui perubahan pusat perhatian dalam pengawasan kepada kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. selain itu perlu juga adanya peningkatan hubungan dan keterbukaan informasi

terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, agar fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawasi anggaran pendapatan dan belanja desa dapat berjalan dengan optimal.

- h. Gaya kepemimpinan tidak efektif yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana Kepala Desa Selomarto tidak mementingkan tugas atau hasil karena dalam memberikan arahan kepada perangkat tidak ada ketentuan yang harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kepala Desa Selomarto perlu mengubah gaya kepemimpinan dengan lebih mementingkan tugas atau hasil, karena beliau juga memiliki kewibawaan yang kuat dan hubungan yang baik dengan perangkat desa.
- i. Kualitas perangkat desa yang rendah menjadi faktor penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, Berkaitan dengan hal itu, perlu diadakan pembinaan, pelatihan dan pendampingan perangkat desa

yang lebih intens mengenai kebijakan, prosedur dan arahan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri maupun Pendamping Desa Selomarto.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardja. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982..*Pengambilan Keputusan (Decision Making)*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Hariani, Dyah. 2013. *Azas-Azas Manajemen*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Bumi Aksara: Jakarta
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosen Publishing: Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Jakarta: Bina Aksara
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategik Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Kencana Syafiie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kencana Syafiie, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta

Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Thoha Miftah. 2017. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Ceria

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia.

Wahjosumidjo. 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

SUMBER LAIN

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/> (Diakses pada Minggu, 9 September 2018)